



**Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia**

LAPORAN KINERJA 2023

BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN



TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Chairil Patria, S.IP., M.Si.

EDITOR

Andi Iswanto, S.IP., M.I.P. • Wasono, S.H.
Puji Lestari, S.E. • Asep Supriadi, S.A.P., M.A.P. • Prima Cahya Chandrasari, S.E.
Aan Andrianih, S.H., M.H. • Agung Sulistiono, S.H., M.H.
Bayu Setiadi, S.I.P. • Rifan Rachman Safari Andalas, S.Sos., M.H.
• Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

Biro Kesekretariatan Pimpinan
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 15 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk semua.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan untuk mengemban amanah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, khususnya dalam menyelesaikan Buku Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) ini, yang sebelumnya bernama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang dipercayakan kepada Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR-RI melalui Perjanjian Kinerja (PK). Laporan ini menyajikan berbagai capaian strategis dan keberhasilan di Biro Kesekretariatan Pimpinan. Selain itu, laporan ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan peningkatan kinerja menuju terwujudnya *Good Governance* serta menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan para *stakeholders* Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun dan seluruh jajaran Biro Kesekretariatan Pimpinan atas kerja keras serta dedikasinya sehingga apa yang kita kerjakan bersama dapat membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, yaitu terwujudnya Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami membuka diri terhadap berbagai masukan, baik kritik, saran maupun pandangan konstruktif yang ditujukan untuk kesempurnaan Laporan Kinerja ini, khususnya untuk pembuatan Laporan Kinerja selanjutnya karena Laporan Kinerja ini akan terus mengikuti perkembangan dinamika sesuai dengan perubahan yang terjadi di lembaga yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Jakarta, 2 Januari 2024
Kepala Biro Kesekretariatan
Pimpinan,


Chairil Patria, S.IP., M.Si.

Ikhtisar Eksekutif

Sebagai bentuk akuntabilitas, Biro Kesekretariatan Pimpinan, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maupun dalam mengelola anggaran 2023, telah menyusun Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023. Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sekaligus sebagai *feedback* dalam perbaikan kinerja di tahun mendatang sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Selain itu, laporan kinerja ini juga merupakan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan, khususnya kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dan pemangku kepentingan pada umumnya.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Persidangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI serta dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan, serta pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi.

Capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana terlihat dari capaian kinerja Satker Setjen sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023. Sementara, capaian kinerja Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana terlihat sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas dukungan kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI	100%	100%	100%
	2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100%	100%	100%
	3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan	3,33	3,69	110,81%

	DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI			
	5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	99%	99,24%	100,24%
TOTAL				102,21%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator di atas, capaian sasaran kegiatan dari Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah 102,21%. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh tersebut masih perlu terus ditingkatkan guna merespons tuntutan dukungan kepada DPR RI yang semakin dinamis. Dengan demikian, hasil capaian kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target bahkan melebihi target yang direncanakan. Hal ini menandakan bahwa dukungan untuk Pimpinan di Tahun 2023 telah berjalan sangat lancar dan berhasil mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Alokasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2023 untuk mencapai sasaran strategis unit kerja Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah sebesar Rp19.914.357.000,00. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesekretariatan Pimpinan dari pagu anggaran yang dialokasikan tersebut, sampai dengan Desember 2023, yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp19.762.982.093,00 dengan persentase 99,24%.

Dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan secara keseluruhan ke depan yaitu perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Berkomitmen mengoptimalkan dukungan kesekretariatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI secara profesional dan modern;
- 2) Berkomitmen mengoptimalkan dukungan persidangan Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan sesuai dengan standar yang berlaku;
- 3) Berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi secara tertib dan akuntabel;
- 4) Berkomitmen mengupayakan penggunaan teknologi informasi (digitalisasi) dalam memberikan dukungan, baik kepada Pimpinan DPR RI maupun kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
- 5) Berkomitmen untuk mengkaji dan melakukan reuiu kembali Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan yang telah ditetapkan bersama unit kerja terkait sehingga diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum	1
Kelembagaan.....	2
Struktur Organisasi	2
Dukungan Sumber Daya Manusia	4
Peran Strategis	6
Permasalahan Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
Rencana Strategis 2020 – 2024.....	9
Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
Capaian Kinerja	15
Pengukuran Kinerja.....	15
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP.....	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Perbandingan ABK di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan	7
Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Deputi Bidang Persidangan.....	11
Tabel 3. Tabel Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023	12
Tabel 4. Anggaran Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan	13
Tabel 5. Capaian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023.....	16
Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023.....	16
Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	17
Tabel 8. Rekapitulasi Persidangan / Rapat Muspim	20
Tabel 9. Rekapitulasi Persidangan / Rapat Bamus.....	20
Tabel 10. Rekapitulasi Dokumen Persidangan Muspim.....	21
Tabel 11. Rekapitulasi Dokumen Persidangan Bamus	21
Tabel 12. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 1	22
Tabel 13. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI.....	25
Tabel 14. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	25
Tabel 15. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korekku	26
Tabel 16. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korinbang	26
Tabel 17. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korkesra	27
Tabel 18. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI.....	27
Tabel 19. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	28
Tabel 20. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korekku	28
Tabel 21. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korinbang	28
Tabel 22. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korkesra	29
Tabel 23. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 2.....	30
Tabel 24. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Tata Usaha Pimpinan DPR RI	32
Tabel 25. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	33
Tabel 26. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 3.....	34
Tabel 27. Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan.....	36
Tabel 28. Indeks Persepsi Kualitas Layanan	37
Tabel 29. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 4.....	38
Tabel 30. Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	41
Tabel 31. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 5.....	41
Tabel 32. Perubahan Alokasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023 dan realisasinya	44
Tabel 33. Capaian Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen (Satker Setjen)	44
Tabel 34. Capaian Kinerja Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan	3
Gambar 2. Grafik Data Pegawai di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan	4
Gambar 3. Grafik Data berdasarkan Pendidikan	4
Gambar 4. Grafik Data Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan	5
Gambar 5. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Usia	5
Gambar 6. Grafik Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	6
Gambar 7. Grafik ABK Pegawai di Biro Kesekretariatan Pimpinan	8

BAB I

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja di setiap tahun anggaran. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana seluruh entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, termasuk satuan kerja setingkat eselon II wajib menyusunnya.

Sebagai wujud tanggung jawab atas pencapaian kinerja, Biro Kesekretariatan Pimpinan yang merupakan salah satu unit eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, yang secara umum memiliki tugas dan fungsi melakukan dukungan dan pelayanan terhadap Pimpinan DPR RI telah melakukan penyusunan atas Laporan Kinerja (LKj) selama Tahun Anggaran 2022. Penyusunan laporan ini mengacu kepada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023 ini berisi gambaran realisasi dan tingkat capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan berikut capaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan pada Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang kemudian ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Deputi Bidang Persidangan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan. Selain itu, hasil Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi, serta upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk mendorong pelaksanaan tugas secara baik dan benar di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan pada masa yang akan datang.

Kelembagaan

Sekretariat Jenderal DPR RI diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020, untuk Biro Kesekretariatan Pimpinan memiliki tugas pokok menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta dukungan persidangan Badan Musyawarah. Adapun kelembagaan Biro Kesekretariatan Pimpinan diatur berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, terakhir diubah melalui Persekjen Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Biro Kesekretariatan Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Persidangan.

Fungsi yang melekat pada Biro Kesekretariatan Pimpinan	penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang dukungan kesekretariatan pimpinan
	pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dukungan pelaksanaan tugas Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
	pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Badan Musyawarah;
	pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Musyawarah Pimpinan
	pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal
	pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi
	penyusunan laporan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan
	pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputy Bidang Persidangan
	penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan

Struktur Organisasi

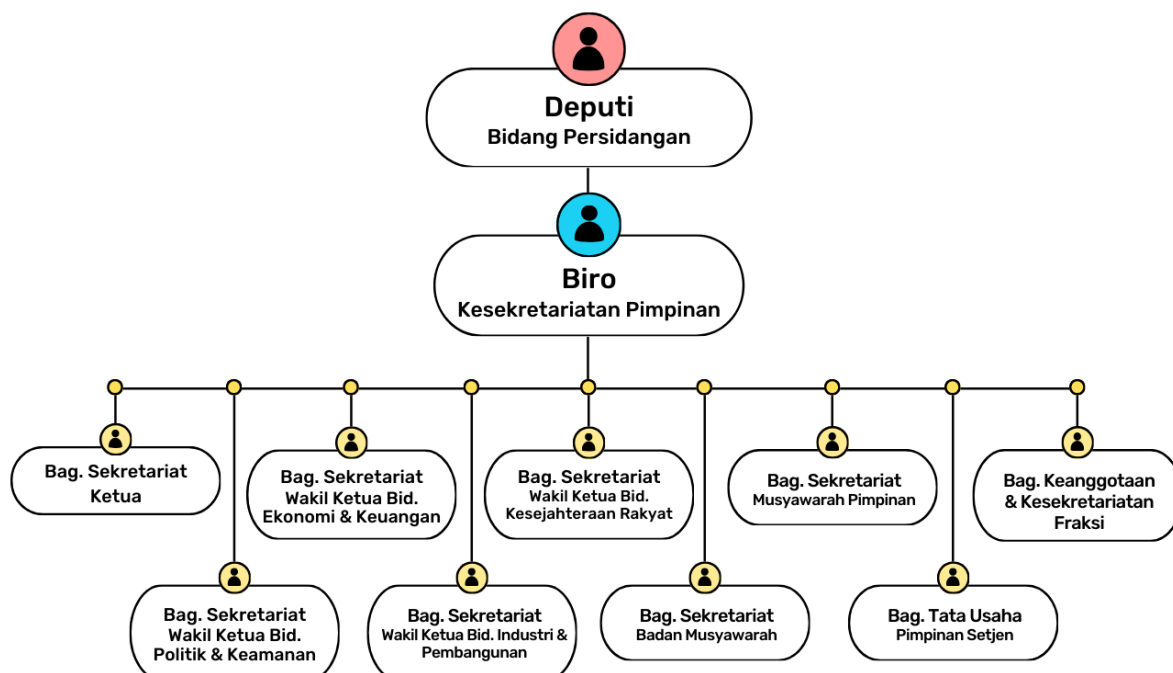
Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 maka ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Adapun unit-unit kerja yang berada di bawah Biro Kesekretariatan Pimpinan, sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Ketua; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
2. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
3. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
4. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
5. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
6. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
7. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
8. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 4 (empat) Kasubag.
9. Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

Struktur organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan secara keseluruhan tertuang dalam gambar berikut ini:

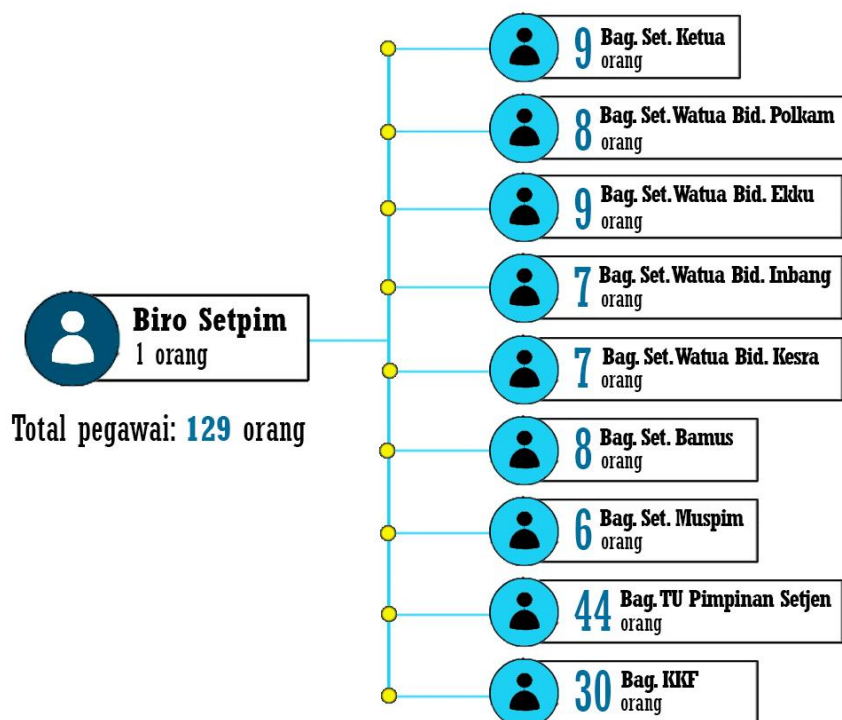
Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan



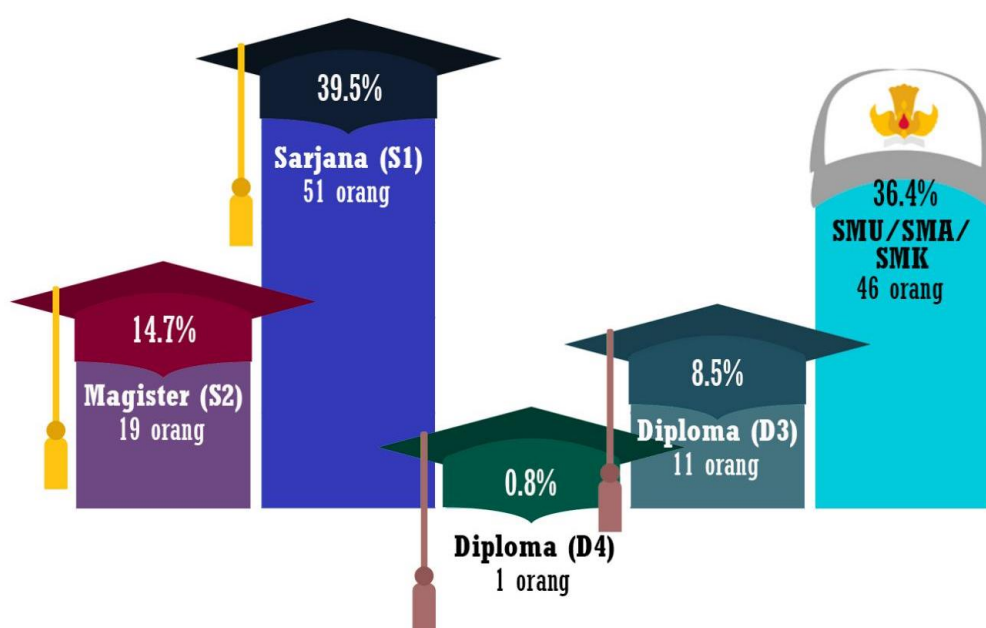
Dukungan Sumber Daya Manusia

Keseluruhan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan berjumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) orang, yang tersebar di 9 (sembilan) Bagian unit kerja. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

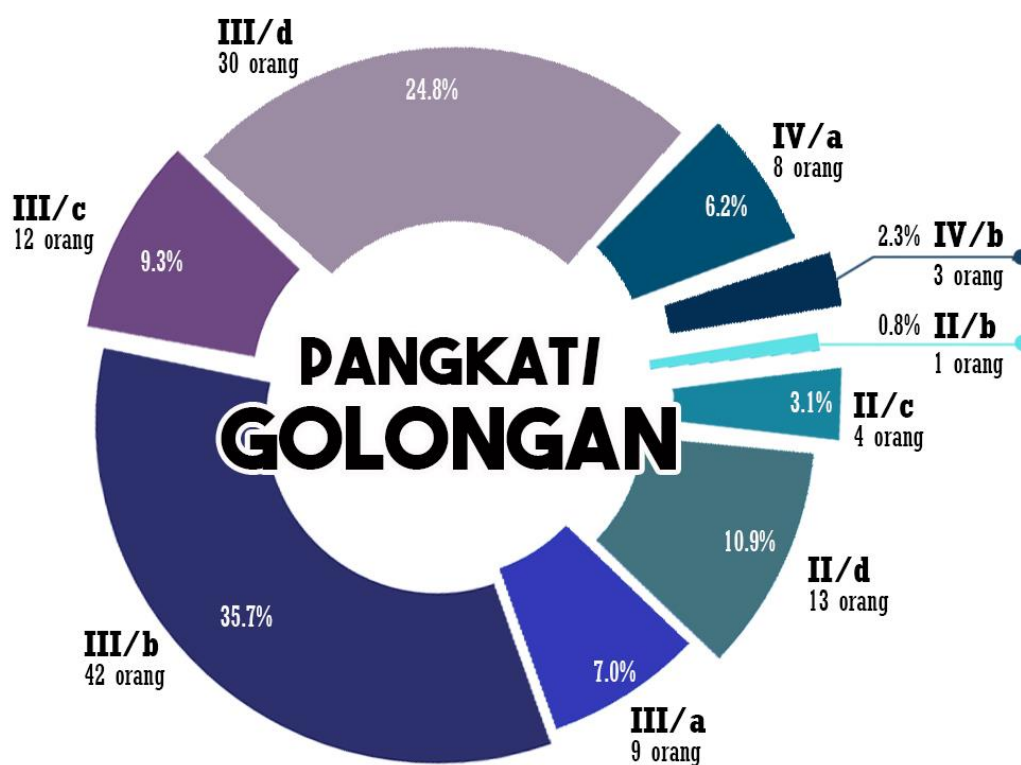
Gambar 2. Grafik Data Pegawai di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan



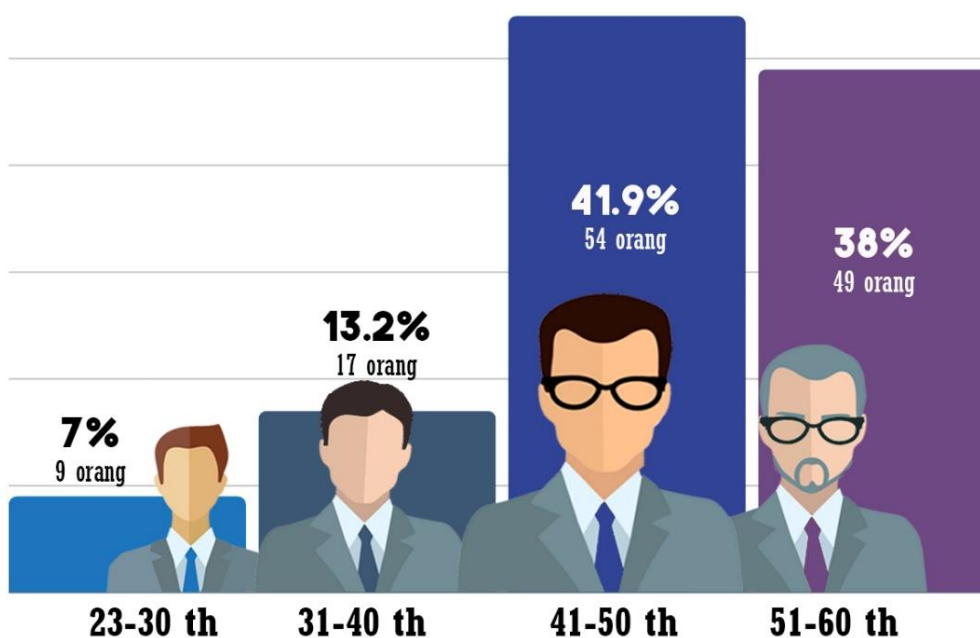
Gambar 3. Grafik Data berdasarkan Pendidikan



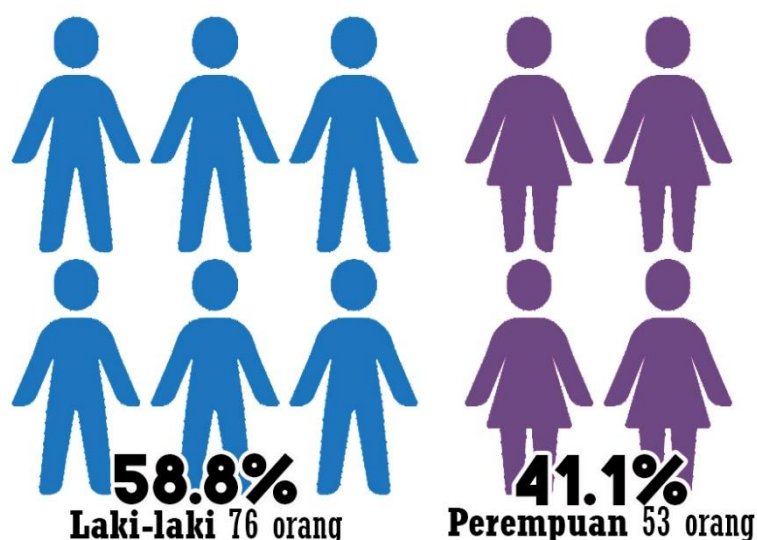
Gambar 4. Grafik Data Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan



Gambar 5. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Usia



Gambar 6. Grafik Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Peran Strategis

Peran Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam mewujudkan dan mengimplementasikan tujuan dalam renstra Sekretariat Jenderal DPR RI serta visi dan misi dari Deputi Bidang Persidangan sangatlah penting dan strategis yaitu mendukung penyelenggaraan rapat-rapat yang mana keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan mengikat. Keputusan mengikat dalam hal ini berarti keputusan rapat yang dihasilkan harus dilaksanakan oleh seluruh Anggota DPR dan AKD sehingga kecepatan, ketepatan, ketelitian serta kualitas kerja SDM di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan sangat dibutuhkan terutama dalam memberikan layanan yang profesional dan modern serta paripurna bagi Pimpinan baik Pimpinan DPR RI maupun Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

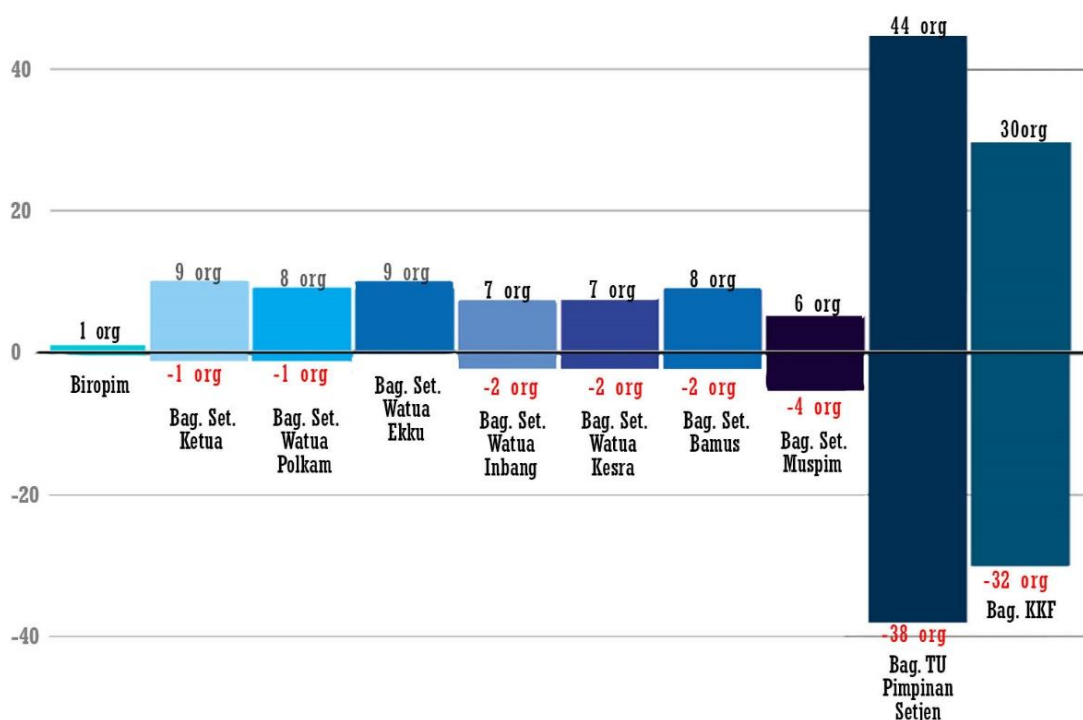
Permasalahan Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan yaitu dari segi kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini. Jika dilihat dari peta jabatan yang memuat perbandingan antara jumlah pegawai saat ini dengan jumlah Analisis Beban Kerja (ABK) yang ada di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan belum memadai, dan mengalami kekurangan pegawai sebanyak 82 (Delapan Puluh Dua orang). Adapun rincian perbandingan ABK di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perbandingan ABK di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEMANGKU	JUMLAH KEBUTUHAN	SELISIH	
				+	-
1	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	1	1	0	0
2	Bagian Sekretariat Ketua	9	10	0	1
3	Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	8	9	0	1
4	Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	9	9	0	0
5	Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	7	9	0	2
6	Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	7	9	0	2
7	Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	8	10	0	2
8	Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan	6	10	0	4
9	Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal	44	82	0	38
10	Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi	30	62	0	32
JUMLAH		129	211	0	82

Gambar 7. Grafik ABK Pegawai di Biro Kesekretariatan Pimpinan



Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan Pegawai ASN di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan cukup signifikan. Hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan walaupun saat ini kekurangan pegawai yang ada sudah dilakukan melalui penerimaan pegawai PPNASN tetapi jumlahnya masih dibawah ABK yang sudah ada serta tugas fungsinya tetap tidak bisa menggantikan posisi ASN yang seharusnya ada di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Di samping itu, permasalahan yang lain adalah dari sisi usia pegawai ASN yang ada di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan. Berdasarkan data yang ada, usia dengan range 41-50 tahun berjumlah 54 Orang (41,9%) dan Usia 51 - 60 tahun sebanyak 49 orang (38%) dari total sumber daya manusia di Biro Kesekretariatan Pimpinan dimana semakin tinggi usia pegawai tentu berpengaruh terhadap penerimaan atas perubahan dan perkembangan penguasaan teknologi yang sangat cepat, karena SDM merupakan modal utama untuk menggerakkan mesin organisasi. Untuk itu, diperlukan peningkatan terus menerus baik dari segi kuantitas maupun kualitas SDM yang meliputi peningkatan kompetensi, penguasaan teknologi, peningkatan kecepatan, ketepatan, ketelitian dan kualitas hasil kerja dalam rangka memberikan dukungan dan layanan yang optimal bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis 2020 – 2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap 3 fungsi DPR (legislasi, anggaran, pengawasan), program kerja Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2019-2024 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

VISI

Biro Kesekretariatan Pimpinan tidak merumuskan visi dan misi sendiri, karena visi dan misi ada dalam satu naungan, yaitu visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI, dan organisasi di bawahnya menjalankan program-program yang dituangkan dalam visi tersebut. Sesuai dengan kedudukannya visi Sekretariat Jenderal DPR RI yang dirumuskan dan diturunkan melalui program kerja Deputi Bidang Persidangan akan menjadi pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan pelaksanaan tugas Biro Kesekretariatan Pimpinan. Oleh karena itu apa yang akan dicapai oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam kurun waktu lima tahun ini harus selaras dengan program Deputi Bidang Persidangan.

Adapun visi Deputi Bidang Persidangan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yaitu:

“Menjadi Deputi Bidang Persidangan yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Profesional artinya Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan modern berarti memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Sekretariat Jenderal DPR RI yang didukung oleh Deputi Bidang Persidangan untuk menjadikan jajarannya berkinerja lebih tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Atas dasar hal tersebut melalui Deputi Bidang Persidangan, Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu menyelenggarakan dukungan Kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, dukungan Persidangan kepada Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan, serta Pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi.

MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Misi Deputi Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Deputi Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu dan berpegang teguh pada Visi dan Misi Deputi Bidang Persidangan DPR RI tersebut dan berupaya untuk:

- a. Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan Pimpinan Dewan;
- b. Meningkatkan kualitas dukungan kegiatan Rapat Pimpinan, Rapat/Pertemuan Konsultasi, Rapat Koordinasi, dan Rapat Badan Musyawarah yang optimal; dan
- c. Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha, rapat-rapat dan kerumahtanggaan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, sesuai dengan tujuan Deputi Bidang Persidangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- 1) terwujudnya dukungan persidangan, administrasi yang tepat, cepat, dan akurat yang dibutuhkan oleh DPR RI;
- 2) terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih;
- 3) terwujudnya dukungan keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik.

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program. Oleh karena itu, sasaran Biro Kesekretariatan Pimpinan sesuai dengan program Deputi Bidang Persidangan. Pada pertengahan tahun 2023 terjadi perubahan Struktur Organisasi yang berdampak terjadi perubahan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut memuat perubahan penataan struktur organisasi serta perubahan nomenklatur unit kerja organisasi di lingkup Setjen DPR RI agar lebih tepat Fungsi. Perubahan tersebut juga sebagai tindak lanjut atas disahkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan Struktur Organisasi) telah mengakomodir perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja pada unit kerja. Selain itu, penyesuaian target kinerja atas hasil evaluasi capaian tahun 2022 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi KemenPANRB terhadap penilaian AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Sekretariat Jenderal DPR RI. Karena hal tersebut maka terjadi pula perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja pada Deputi Bidang Persidangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Deputi Bidang Persidangan

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Hasil pengawasan kearsipan Lembaga DPR RI.	BB	A	A	A
	2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik.	Menuju informatif	Informatif	Informatif (98.14)	Informatif (98.15)

Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	3.22	3.24	3.32	3.33
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB	A	-	-
	2. Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B	BB (75.00)	BB (76.00)

Pada tahun 2023 sasaran Program/kegiatan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas”, dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan” sudah tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan, karena hal tersebut maka terjadi perubahan Perjanjian Kinerja pada unit kerja dibawah jajaran Deputi Bidang Persidangan, salah satunya ada Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Perjanjian Kinerja

Biro Kesekretariatan Pimpinan telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disesuaikan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Tahun 2023 dan selaras dengan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan, serta sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023.

Tabel 3. Tabel Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI.	100%
		2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI.	100%
		3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI.	100%
		4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan	3,33

		Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI.	
		5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.	99%

Tabel 4. Anggaran Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan

SATKER / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
Dukungan Manajemen	Rp12.855.807.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menguraikan akuntabilitas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan, khususnya kinerja yang tertuang dalam Satuan Kerja (Satker) Setjen pada Tahun Anggaran 2023, untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2023. Di samping itu, juga akan diuraikan akuntabilitas keuangan dari anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Satker Setjen pada Tahun Anggaran 2023.

Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja akan menggambarkan realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, tentunya Perjanjian Kinerja tahun 2023 menjadi acuan pengukuran capaian kinerja pada tahun berjalan.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara pengukuran, di antaranya yaitu: (a) Perbandingan dengan tingkat kinerja yang direncanakan; (b) Perbandingan dengan tingkat kinerja yang lalu; (c) Perbandingan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam satu periode jangka menengah; (d) Perbandingan dengan unit organisasi sejenis. Adapun pengukuran kinerja pada tahun 2023, menjadikan Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2023 sebagai acuan pengukuran, atau dengan kata lain pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan tingkat kinerja yang direncanakan. Pada tahun 2023 ini, Biro Kesekretariatan Pimpinan akan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada Program Dukungan Manajemen yang merupakan bagian dari Satker Setjen. Adapun program tersebut adalah merupakan Kegiatan Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan.

Berdasarkan Program Dukungan Manajemen tersebut, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan indikator-indikator keberhasilan untuk mencapai kinerja yang ingin diraih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023. Adapun capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada Tahun 2023 seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Capaian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%
	2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%
	3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI.	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI.	3,33	3,69	110,81%
	5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.	99%	99,24%	100,24%

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023

SASARAN: Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan								
INDIKATOR KINERJA:								
TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase dukungan persidangan Pimpinan DPR RI								
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI								
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan Setjen DPR RI								
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI								
3,31	3,13	94,56%	3,31	3,33	100,60%	3,33	3,69	110,81%
5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan								

92,5%	96,64%	104,47%	92,5%	96,16%	103,96%	99%	99,24%	100,24%
-------	--------	---------	-------	--------	---------	-----	--------	---------

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

PROGRAM	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				CAPAIAN 2023	
			2021	2022	2023	2024	REALISASI	CAPAIAN
Dukungan Manajemen	Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI.	3,31	3,31	3,31	3,33	3,69	110,81%
		5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.	92,5%	92,5%	92,5%	99%	99,24%	100,24%

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dapat kami sampaikan bahwa terdapat perbedaan Sasaran/Program Kegiatan pada Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022. Adapun Sasaran/Program Kegiatan pada Tahun 2020 yakni "*tersedianya dokumen materi persidangan*", sedangkan untuk Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Tahun 2023, Sasaran/Program Kejadiannya yakni "*Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan*".

Di samping itu, terkait dengan Indikator Kinerja juga terdapat perbedaan pada Tahun 2020 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022. Pada Tahun 2020, terdapat 6 Indikator Kinerja, yang mana terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang tidak ada di Tahun 2021 dan Tahun 2022, yakni "*Persentase dukungan administrasi SK, assessment dan orientasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan PPNASN yang standar*". Perbedaan tersebut terjadi karena pada Tahun 2021 terdapat perubahan struktur organisasi sesuai Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 juga mengalami perubahan pada nomenklatur indikator kinerja. Perubahan nomenklatur indikator kinerja tersebut dimaksudkan untuk memberikan penekanan bentuk dukungan yang dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan melalui unit kerja yang berada di bawahnya sehingga diharapkan bentuk dukungan yang dilakukan seluruh unit kerja di bawah Biro Kesekretariatan Pimpinan dapat terakomodir.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dilakukan berdasarkan dari perjanjian kinerja Satker Setjen yang telah ditetapkan di tahun 2023. Perjanjian kinerja tersebut ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang dilakukan Biro Kesekretariatan Pimpinan selama tahun 2023 dengan Sasaran/Program Kegiatan, yaitu meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan dengan lima Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI, (2) Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI, (3) Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI, (4) Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, Anggota DPR RI, dan Pimpinan Setjen DPR RI, dan (5) Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI. Adapun penjelasan dari tiap-tiap indikator kinerja sebagai berikut.

Penjelasan Indikator Kinerja Nomor 1

INDIKATOR KINERJA

Persentase dukungan persidangan Pimpinan DPR RI



Target
100%



Realisasi
100%



Capaian
100%

Persentase dukungan persidangan Pimpinan DPR RI merupakan Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah.

Penghitungan kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” berdasarkan terlaksananya dukungan kegiatan yang menghasilkan skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah selama lima Masa Persidangan dalam satu tahun anggaran. Capaian kinerja tersebut dapat diperoleh ketika skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah telah disampaikan kepada Pimpinan/Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan DPR RI. Dengan demikian, berapapun jumlah dokumen skenario, laporan singkat/kesimpulan, dan tindak lanjut hasil persidangan/rapat-rapat yang dihasilkan oleh Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan dan Badan Musyawarah tersebut, secara kualitatif tidak memengaruhi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan sehingga realisasi dan capaiannya kinerjanya tetap 100%.

Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan (Muspim) dan Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus), dengan tugas utama memberikan dukungan kelancaran dalam penyusunan dokumen rapat-rapat Pimpinan DPR RI, baik berupa skenario, laporan singkat/kesimpulan, maupun tindak lanjut hasil dari rapat-rapat tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2023, Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus, telah melaksanakan dukungan serangkaian kegiatan rapat-rapat Pimpinan, baik Rapat Pimpinan DPR RI, Rapat Konsultasi/Koordinasi, dan Rapat Bamus.

Adapun kegiatan dukungan persidangan/rapat-rapat Pimpinan DPR RI yang telah dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus, sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 8. Rekapitulasi Persidangan / Rapat Muspim

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS RAPAT	JUMLAH RAPAT
1	MP III	Rapat Pimpinan Pertemuan konsultasi Rapat Koordinasi	5
2	MP IV	Rapat Pimpinan Pertemuan konsultasi Rapat Koordinasi Rapat konsultasi	6
3	MP V	Rapat Pimpinan Pertemuan konsultasi Rapat Koordinasi Rapat konsultasi	9
4	MP I	Rapat Pimpinan Pertemuan konsultasi Rapat Koordinasi Rapat konsultasi	7
5	MP II	Rapat Pimpinan Pertemuan konsultasi Rapat Koordinasi Rapat konsultasi	4
JUMLAH			31

Sumber: *Bagian Sekretariat Muspim*

Tabel 9. Rekapitulasi Persidangan / Rapat Bamus

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS RAPAT	JUMLAH RAPAT
1	MP III	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah	3
2	MP IV	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah	3
3	MP V	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah	3
4	MP I	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah	2
5	MP II	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah	2
JUMLAH			13

Sumber: *Bagian Sekretariat Bamus*

Berdasarkan kegiatan persidangan/rapat-rapat tersebut, capaian kinerja Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus, yaitu masing-masing tercapai sebanyak 5 dokumen Persidangan/Rapat-Rapat Pimpinan DPR RI dalam satu tahun sidang, yang terdiri dari 1 dokumen dalam tiap masa persidangan yang berisi dokumen skenario, laporan

singkat/kesimpulan, dan tindak lanjut hasil persidangan/rapat-rapat, dengan rincian dokumen sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 10. Rekapitulasi Dokumen Persidangan Muspim

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH RAPAT	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	5	1	1	100%
2	MP IV	6	1	1	100%
3	MP V	9	1	1	100%
4	MP I	7	1	1	100%
5	MP II	4	1	1	100%
TOTAL		31	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Muspim.*

Tabel 11. Rekapitulasi Dokumen Persidangan Bamus

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH RAPAT	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	3	1	1	100%
2	MP IV	3	1	1	100%
3	MP V	3	1	1	100%
4	MP I	2	1	1	100%
5	MP II	2	1	1	100%
TOTAL		13	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Bamus.*

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus telah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” dengan target 100%, telah terealisasi 100% sehingga capaian kerjanya adalah 100%.

Indikator Kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” tersebut jika dibandingkan dan dianalisis dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 1

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” adalah tercapai 100%		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” adalah seluruhnya tercapai 100%		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Capaian 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	
100%	100%	100%	
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir dalam Renstra pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” adalah tercapai 100%		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional			
Penjelasan	Jika melihat indikator kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.		
5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan			
Penjelasan	<p>Analisis Keberhasilan: Dukungan persidangan berupa seluruh dokumen rapat telah digunakan oleh Pimpinan DPR RI.</p> <p>Alternatif Solusi: - Dokumen Rapat telah disusun secara cepat dan tepat.</p>		

	- Unit kerja (Bamus dan Muspim) telah aktif melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi dengan unit kerja lainnya yang terkait.		
6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya			
Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian
Muspim	302.930.000	302.814.700	99.96%
Bamus	392.424.000	329.130.500	99.93%
Penjelasan	Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja "Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI" telah dilaksanakan secara efisien dan efektif, mengingat bahwa kinerja tidak berbanding lurus dengan penggunaan anggaran yang ada sehingga meskipun realisasi anggaran tercapai 99,96% pada Muspim dan 99,71% pada Bamus, tetapi capaian kinerja tetap tercapai 100%.		
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja			
Penjelasan	<p>Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan selama tahun 2023 dalam hal menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja "Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI" adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Kesekretariatan Pimpinan telah melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi terhadap unit kerja terkait dengan pemberian dukungan persidangan Pimpinan DPR RI. 2. Biro Kesekretariatan Pimpinan telah menindaklanjuti hasil keputusan rapat-rapat (Rapat Pimpinan, Rapat Konsultasi, Rapat Bamus, Rapat Paripurna) yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 3. Menindaklanjuti keputusan rapat-rapat (Rapat Pimpinan, Pertemuan konsultasi, Rapat Koordinasi, Rapat konsultasi) sesuai dengan mekanisme yang berlaku, antara lain membuat surat-surat tindak lanjut hasil keputusan rapat Musyawarah Pimpinan. 		

Penjelasan Indikator Kinerja Nomor 2

INDIKATOR KINERJA

Persentase dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI



Target
100%



Realisasi
100%



Capaian
100%

Persentase dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI merupakan Persentase dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI.

Penghitungan kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” berdasarkan terlaksananya dukungan kegiatan yang menghasilkan dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI selama lima Masa Persidangan dalam satu tahun anggaran. Capaian kinerja tersebut dapat diperoleh ketika dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.

Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Bagian Sekretariat Wakil-Wakil Ketua DPR RI (Korpolkam, Korekku, Korinbang, dan Korkesra), dengan tugas utama memberikan dukungan kerumahtanggaan dan tata usaha Pimpinan DPR RI, baik berupa dokumen kerumahtanggaan maupun dokumen tata usaha. Sampai dengan akhir tahun 2023, Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI.

Secara garis besar kegiatan Pimpinan DPR RI terbagi dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan personal/individual dan kegiatan kolektif kolegal. Kegiatan personal/individual Pimpinan DPR RI terbagi dalam tiga bagian, yaitu *pertama*, terkait dengan penerimaan tamu, baik penerimaan tamu dalam negeri maupun tamu luar negeri. *Kedua*, terkait dengan kunjungan kerja, baik kunjungan kerja dalam negeri maupun kunjungan kerja luar negeri, sedangkan *ketiga*, terkait dengan kegiatan lain-lain (memberikan pidato/ceramah/sambutan/ucapan, wawancara, tapping atas permintaan publik, baik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DPRD, LSM, Universitas/Sekolah Tinggi, Media/Televisi maupun dari organisasi Masyarakat). Kegiatan personal/individual ini ditangani oleh Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI.

Sementara, kegiatan Pimpinan DPR RI secara kolektif kolegial ditangani oleh unit kerja lain, yaitu seperti kegiatan Rapat Pimpinan DPR RI, Rapat Konsultasi/Koordinasi DPR RI, Rapat Bamus, Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, ditangani oleh Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus. Sementara, kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ditangani oleh Bagian Persidangan Paripurna.

Adapun kegiatan dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI yang telah dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI, sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (2) • Kunker (10) • Lain-lain (10) 	22
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (1) • Kunker (10) • Lain-lain (9) 	20
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (1) • Kunker (10) • Lain-lain (9) 	20
4	MP I	<ul style="list-style-type: none"> • Kunker (6) • Lain-lain (14) 	20
5	MP II	<ul style="list-style-type: none"> • Kunker (10) • Lain-lain (13) 	23
JUMLAH			105

Sumber: *Bagian Sekretariat Ketua DPR RI*

Tabel 14. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (14) • Kunker (1) • Lain-lain (7) 	22
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (5) • Kunker (1) • Lain-lain (8) 	14

3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (11) • Kunker (1) • Lain-lain (10) 	22
4	MP I	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (10) • Kunker (1) • Lain-lain (7) 	18
5	MP II	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (12) • Kunker (1) • Lain-lain (9) 	22
JUMLAH			98

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam*

Tabel 15. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korekku

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (7) • Kunker (1) • Lain-lain (13) 	21
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (4) • Kunker (1) • Lain-lain (15) 	20
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (4) • Kunker (1) • Lain-lain (14) 	19
4	MP I	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (6) • Kunker (1) • Lain-lain (15) 	22
5	MP II	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (6) • Kunker (1) • Lain-lain (10) 	17
JUMLAH			99

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korekku*

Tabel 16. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korinbang

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (6) • Kunker (9) 	15

2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> Tamu (15) Kunker (7) 	22
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> Tamu (5) Kunker (10) 	15
4	MP I	<ul style="list-style-type: none"> Tamu (8) Kunker (7) 	15
5	MP II	<ul style="list-style-type: none"> Tamu (10) Kunker (3) 	13
JUMLAH			80

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korinbang*

Tabel 17. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korkesra

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> Tamu (4) Kunker (21) 	25
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> Tamu (2) Kunker (12) 	13
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> Tamu (2) Kunker (17) 	19
4	MP I	<ul style="list-style-type: none"> Tamu (4) Kunker (18) 	22
5	MP II	<ul style="list-style-type: none"> Tamu (1) Kunker (3) 	4
JUMLAH			83

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korkesra*

Berdasarkan pelaksanaan tugas kegiatan tersebut, capaian kinerja dari tiap-tiap Bagian Sekretariat Pimpinan DPR RI, yaitu masing-masing tercapai sebanyak 5 dokumen Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI dalam satu tahun anggaran, yang terdiri dari 1 dokumen dalam tiap masa persidangan yang berisi dokumen kerumahtangaan dan dokumen tata usaha, dengan rincian dokumen sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 18. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	22	1	1	100%

2	MP IV	20	1	1	100%
3	MP V	20	1	1	100%
4	MP I	20	1	1	100%
5	MP II	23	1	1	100%
TOTAL		105	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Ketua DPR RI*

Tabel 19. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	22	1	1	100%
2	MP IV	14	1	1	100%
3	MP V	22	1	1	100%
4	MP I	18	1	1	100%
5	MP II	22	1	1	100%
TOTAL		98	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam*

Tabel 20. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korekku

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	21	1	1	100%
2	MP IV	20	1	1	100%
3	MP V	19	1	1	100%
4	MP I	22	1	1	100%
5	MP II	17	1	1	100%
TOTAL		99	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korekku*

Tabel 21. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korinbang

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
-----	------------------	-----------------	------------------	---------------------	---------

1	MP III	15	1	1	100%
2	MP IV	22	1	1	100%
3	MP V	15	1	1	100%
4	MP I	15	1	1	100%
5	MP II	13	1	1	100%
TOTAL		80	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korinbang*

Tabel 22. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI/Korkesra

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	25	1	1	100%
2	MP IV	13	1	1	100%
3	MP V	19	1	1	100%
4	MP I	22	1	1	100%
5	MP II	4	1	1	100%
TOTAL		83	5	5	100%

Sumber: *Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI/Korkesra*

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI telah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” dengan target 100%, telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan Pimpinan DPR RI telah didukung dengan dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha dari Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI, baik berupa dokumen penerimaan tamu, dokumen persiapan dan pelaksanaan kunjungan kerja, maupun dokumen kegiatan lain-lain seperti dalam memberikan sambutan, wawancara, dan sebagainya.

Indikator Kinerja “Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI” tersebut jika dibandingkan dan dianalisis dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 23. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 2

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” adalah tercapai 100%		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” adalah seluruhnya tercapai 100%		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Capaian 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	
100%	100%	100%	
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir dalam Renstra pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” adalah tercapai 100%.		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional			
Penjelasan	Jika melihat indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.		
5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan			
Penjelasan	<p>Analisis Keberhasilan: Dukungan pelaksanaan tugas berupa seluruh dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha telah digunakan oleh Pimpinan DPR RI.</p> <p>Alternatif Solusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kerumahtanggaan dan tata usaha telah disusun secara cepat dan tepat. - Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI telah aktif melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi dengan unit kerja lainnya yang terkait. 		
6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya			
Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian

Ketua	31.240.000	31.125.000	99.63%
Korpolkam	55.530.000	53.375.000	96.12%
Korekku	48.550.000	48.440.000	99.77%
Korinbang	85.725.000	85.470.000	99.70%
Korkesra	9.800.000	9.800.000	100%
Penjelasan	Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja "Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI" telah dilaksanakan secara efisien dan efektif, mengingat bahwa kinerja tidak berbanding lurus dengan penggunaan anggaran yang ada sehingga capaian kinerja tetap tercapai 100%		
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja			
Penjelasan	<p>Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI selama tahun 2023 dalam hal menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja "Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI" adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI telah melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi terhadap unit kerja terkait dalam hal pemberian dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI. - Bagian Sekretariat Ketua DPR RI dan Wakil-Wakil Ketua DPR RI telah memberikan dukungan yang optimal sesuai dengan mekanisme yang berlaku sehingga kegiatan Pimpinan DPR RI dapat berjalan dengan baik. 		

Penjelasan Indikator Kinerja Nomor 3



Persentase dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan Setjen DPR RI merupakan Persentase dokumen ketatausahaan yang meliputi kegiatan Rapat-rapat dan Tata Usaha (administrasi) baik pengelolaan surat masuk dan surat keluar Sekretariat TU Sekjen dan Sekretariat TU Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat TU Deputi Bidang Administrasi serta Persuratan. Adapun target yang ditetapkan adalah 100% (seratus persen) dan telah terealisasi sebesar 100% (seratus persen). Dukungan kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha

Pimpinan Sekretariat Jenderal selama tahun 2023. Pengukuran persentase pada tahun 2023, dilakukan berdasarkan dokumen persidangan yang disusun oleh Bagian TU. Pimpinan Setjen DPR RI. Sedangkan target yang direncanakan berupa 5 Laporan Kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI

Kelima dokumen Laporan Kegiatan Bagian TU Pimpinan Setjen selama tahun 2023 tersebut dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi dan Persuratan. Secara garis besar kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI terbagi dalam 4 (empat) kegiatan, yaitu kegiatan Ketatausahaan yaitu pengelolaan surat masuk dan surat keluar, personal/individual dan kegiatan kolektif kolegial. Kegiatan personal/individual Pimpinan Setjen DPR RI terbagi dalam tiga bagian, yaitu *pertama*, terkait dengan penerimaan tamu, baik penerimaan tamu dalam negeri maupun tamu luar negeri. *Kedua*, terkait dengan kunjungan kerja, baik kunjungan kerja dalam negeri maupun kunjungan kerja luar negeri, sedangkan *ketiga*, terkait dengan kegiatan lain-lain (memberikan pidato/ceramah/sambutan/ucapan, wawancara, tapping atas permintaan publik, baik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DPRD, LSM, Universitas/Sekolah Tinggi, Media/Televisi maupun dari organisasi Masyarakat). Kegiatan personal/individual ini ditangani oleh Bagian masing-masing Pimpinan Setjen DPR RI yaitu Sekretariat TU Sekjen dan Sekretariat TU Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat TU Deputi Bidang Administrasi serta Persuratan.

Sementara, kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI secara kolektif kolegial ditangani oleh unit kerja lain, yaitu seperti kegiatan Rapat Pimpinan DPR RI, Rapat Konsultasi/Koordinasi DPR RI, Rapat Bamus, Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, ditangani oleh Bagian Sekretariat Muspim dan Bamus. Sementara, kegiatan Rapat Paripurna DPR RI ditangani oleh Bagian Persidangan Paripurna.

Adapun kegiatan dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan Setjen DPR RI yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat TU Sekjen dan Sekretariat TU Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat TU Deputi Bidang Administrasi serta Persuratan sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 24. Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Tata Usaha Pimpinan DPR RI

NO.	MASA PERSIDANGAN	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN
1	MP III	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (12) • Kunker (5) • Surat masuk & keluar (365) 	392

		<ul style="list-style-type: none"> • Lain-lain (10) 	
2	MP IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (8) • Kunker (3) • Surat masuk & keluar (265) • Lain-lain (12) 	288
3	MP V	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (9) • Kunker (5) • Surat masuk & keluar (658) • Lain-lain (8) 	680
4	MP I	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (10) • Kunker (4) • Surat masuk & keluar (458) • Lain-lain (3) 	475
5	MP II	<ul style="list-style-type: none"> • Tamu (12) • Kunker (6) • Surat masuk & keluar (469) • Lain-lain (6) 	493
JUMLAH			2328

Sumber: *Bagian TU Pimpinan Setjen DPR RI.*

Berdasarkan pelaksanaan tugas kegiatan tersebut, capaian kinerja dari tiap-tiap Bagian Sekretariat Pimpinan Setjen DPR RI, yaitu masing-masing tercapai sebanyak 5 dokumen Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI dalam satu tahun anggaran, yang terdiri dari 1 dokumen dalam tiap masa persidangan yang berisi dokumen Ketatausahaan dan dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan rincian dokumen sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 25. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH KEGIATAN	TARGET (dokumen)	REALISASI (dokumen)	CAPAIAN
1	MP III	398	1	1	100%
2	MP IV	288	1	1	100%
3	MP V	680	1	1	100%
4	MP I	475	1	1	100%
5	MP II	495	1	1	100%
TOTAL		2.328	5	5	100%

Sumber: *Bagian TU Pimpinan Setjen DPR RI.*

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Pimpinan Setjen DPR RI telah sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perjanjian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” dengan target 100%, telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Hal ini dikarenakan seluruh kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI telah didukung dengan dokumen Ketatausahaan dan Anggaran dari Bagian Sekretariat Pimpinan Setjen DPR RI baik berupa dokumen penerimaan tamu, dokumen persiapan dan pelaksanaan kunjungan kerja, maupun dokumen kegiatan lain-lain seperti dalam memberikan sambutan, wawancara, dan sebagainya.

Indikator Kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” tersebut jika dibandingkan dan dianalisis dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 26. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 3

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” adalah tercapai 100%		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” adalah seluruhnya tercapai 100%		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Capaian 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	
100%	100%	100%	
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir dalam Renstra pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” adalah tercapai 100%		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional			

Penjelasan	Jika melihat indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.		
5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan			
Penjelasan	<p>Analisis Keberhasilan: Dukungan pelaksanaan tugas berupa seluruh dokumen ketatausahaan, rapat, dan anggaran telah digunakan oleh Pimpinan Setjen DPR RI.</p> <p>Alternatif Solusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen ketatausahaan telah disusun secara cepat dan tepat. - Bagian Sekretariat Pimpinan Setjen DPR RI telah aktif melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi dengan unit kerja lainnya yang terkait. 		
6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya			
Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian
TU Sekjen	2.237.887.000	2.234.647.790	99.86%
TU Deputi Persidangan	2.256.128.000	2.225.490.135	98.64%
TU Deputi Administrasi	7.065.717.000	7.065.667.366	99.99%
Persuratan	663.824.000	623.751.661	93.96%
Penjelasan	Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” telah dilaksanakan secara efisien dan efektif, mengingat kegiatan dan anggaran hampir dilaksanakan sehingga capaian kinerja tercapai 100%		
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja			
Penjelasan	<p>Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian TU Pimpinan Setjen DPR RI selama tahun 2023 dalam hal menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI” adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagian TU Pimpinan Setjen DPR RI telah melakukan komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi terhadap unit kerja terkait dalam hal pemberian dukungan pelaksanaan tugas Pimpinan Setjen DPR RI. - Bagian Sekretariat TU Pimpinan Setjen DPR RI telah memberikan dukungan yang optimal sesuai dengan mekanisme yang berlaku sehingga kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI dapat berjalan dengan baik. 		

Penjelasan Indikator Kinerja Nomor 4



Indeks Kepuasan layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI merupakan nilai survei kepuasan layanan dari Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI.

Penghitungan kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI” dilakukan melalui Survei ke Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI. Kegiatan survei dilaksanakan secara mandiri dan terpisah dari survei yang ditujukan ke Anggota DPR RI karena pelayanan yang diberikan terdapat beberapa perbedaan.

Adapun tabel rentang nilai mutu pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 27. Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	NILAI INDEKS	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	2,60 – 3,064	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532	B	Baik
88,31 – 100,00	3,5324 – 4,000	A	Sangat Baik

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Berdasarkan Permenpan tersebut, Biro Kesekretariatan Pimpinan telah melakukan survei kepada pengguna (*user*), yaitu Pimpinan DPR

RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI. Survei tersebut merupakan salah satu bentuk hasil evaluasi atas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI.

Berdasarkan hasil pengolahan data SPKP dengan pertanyaan kuesioner, diperoleh nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar 3,69 dengan nilai indeks dari masing-masing unsur penilaian terdapat pada table 28. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survei persepsi kualitas pelayanan, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan rumus:

$$NILAI\ INTERVAL\ KONVERSI\ INDEKS = NILAI\ PERSEPSI \times 25$$

Dengan demikian nilai interval konversi Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan menjadi sebesar 92,22. Berdasarkan nilai mutu pelayanan/kinerja unit pelayanan sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, jika merujuk pada Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan, maka Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Ropim Setjen DPR RI memiliki mutu pelayanan "A" dan berada pada kategori "Sangat Baik".

Tabel 28. Indeks Persepsi Kualitas Layanan

NO	PELAYANAN BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	INDEKS INTERVAL KONVERSI	INDEKS PERSEPSI
1	Ketersediaan informasi pelayanan melalui media elektronik/non-elektronik	90,60	3,62
2	Kesesuaian informasi pelayanan dengan persyaratan	91	3,64
3	Kemudahan mengikuti prosedur/alur pelayanan	92	3,68
4	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	89,40	3,58
5	Tidak ada tarif/biaya dalam layanan	97,20	3,89
6	Ketersediaan dan kemudahan sarana prasarana pendukung	91,40	3,66
7	Kecepatan SDM merespons layanan yang diajukan secara online maupun offline	92,40	3,70
8	Kemudahan menggunakan/mengakses layanan konsultasi dan pengaduan	90,20	3,61
9	Layanan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPR RI	95,80	3,83
INDEKS PERSEPSI KUALITAS LAYANAN		92,22	3,69

Hasil survei menunjukkan bahwa hampir seluruh unsur pelayanan mendapatkan hasil indeks persepsi kualitas pelayanan sangat baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa unsur yang memiliki indeks persepsi kualitas pelayanan yang nilainya di atas nilai indeks secara keseluruhan, yaitu tidak adanya tarif/biaya layanan (3,89), kecepatan SDM merespons layanan yang diajukan secara *online* maupun *offline* (3,70), dan pernyataan bahwa layanan yang diberikan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPR RI (3,83).

Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI” tersebut jika dibandingkan dan dianalisis dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 29. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 4

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	3.33%	3.69%	110.81%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI” adalah tercapai 110,81%, dengan mutu A (sangat baik).		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	3.20	3.13	97.81%
2021	3.31	3.13	94.56%
2022	3.31	3.33	100.60%
2023	3.33	3.69	110.81%
Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI”, meskipun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami kenaikan, yakni tetap pada angka indeks 3,13. Namun, dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan kualitas pelayanan, dari kualitas pelayanan baik (B) menjadi kualitas pelayanan sangat baik (A).		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Capaian 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan	
3.69	3.33	110.81%	

Penjelasan	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam Renstra pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI” adalah tercapai 3,69 maka pada Tahun 2023 ini telah tercapai dari target yang ditetapkan dalam Renstra sehingga mengalami tingkat kemajuan sebesar 110,81%.		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional			
Penjelasan	Jika melihat indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI” bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.		
5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan			
Penjelasan	<p>Analisis Keberhasilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan. - Meningkatnya Koordinasi dan Komunikasi yang intensif khususnya antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam memberikan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPR RI, baik dalam segi dukungan operasional maupun substansi serta layanan persidangan. <p>Alternatif Solusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI. - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Biro Kesekretariatan Pimpinan. - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPR RI. 		
6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya			
	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja	3.33	3.69	110.81%

Penjelasan	Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI” telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 110,81% atau meningkat sebesar 10,21% dari tahun 2022. Adapun untuk anggaran pelaksanaan indikator kinerja tersebut, tidak terdapat pagu anggaran yang secara khusus sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	
Penjelasan	<p>Pencapaian indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI, serta Pimpinan Setjen DPR RI” telah tercapai indeks 3,69 dengan kualitas mutu “A” (Sangat Baik). Hal ini tercapai karena hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI. 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Biro Kesekretariatan Pimpinan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI.

Penjelasan Indikator Kinerja Nomor 5



Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan persentase realisasi anggaran Satker Setjen dari seluruh unit Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Penghitungan kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dibagi dengan total pagu anggaran dalam satu tahun anggaran berjalan dikalikan dengan 100 persen.

Sebagaimana diketahui bahwa dukungan anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2023 untuk Satker Setjen adalah Program Dukungan Manajemen yang mana didalamnya terdapat kegiatan fasilitasi kesekretariatan pimpinan.

Berdasarkan satuan kerja tersebut, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan tertuang dalam indikator-indikator keberhasilan yang disusun untuk mencapai kinerja yang ingin diraih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

Untuk melihat gambaran capaian dari indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan”, tentunya harus dilihat perbandingan antara pagu anggaran yang dialokasikan dan realisasi penyerapan anggaran yang dilakukan selama tahun 2023, yang kemudian dikalikan 100 persen sehingga diperoleh capaian dari indikator tersebut.

Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2023, Biro Kesekretariatan mengelola Anggaran Satker Setjen dengan pagu awal sebesar Rp12.855.807.000,00, yang kemudian ada revisi penambahan pagu anggaran sehingga pagu anggarannya menjadi Rp19.914.357.000,00. Dari pagu revisi tersebut, sampai dengan akhir Desember 2023, anggaran telah terealisasi sebesar Rp19.762.982.093,00 sehingga capaian realisasi anggarannya adalah 99,24% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 30. Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan

SATKER	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
SATKER SETJEN	Rp19.642.757.000	Rp19.762.982.093	99.24%

Adapun Indikator Kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” tersebut jika dibandingkan dan dianalisis dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31. Perbandingan dan Analisis Indikator Kinerja 5

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	99%	99.24%	100.24%

Penjelasan	Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 pada indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” adalah tercapai 100,24%.		
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	90%	95.34%	105.93%
2021	92.5%	96.64%	104.48%
2022	92.5%	96.16%	103.96%
2023	99%	99.24%	100.24%
Penjelasan	<p>Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 pada indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” adalah seluruhnya tercapai di atas target yang ditetapkan.</p> <p>Berdasarkan data tersebut terdapat kenaikan target persentase realisasi anggaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, sementara target persentase realisasi anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 masih sama dengan target tahun 2021. Meskipun ada kenaikan target, tetapi untuk capaiannya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan sebagaimana terlihat dalam tabel di atas. Meskipun demikian, capaian kinerja dari Biro Kesekretariatan Pimpinan, dari tahun 2020 sampai dengan 2023, telah mencapai melebihi target yang telah ditetapkan. Artinya, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa seluruh kegiatan berkorelasi langsung dengan tingkat penyerapan anggaran tahun 2023.</p>		
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra			
Penjelasan	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam Renstra pada indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” adalah tidak dapat dibandingkan dikarenakan indikator kinerja tersebut tidak terdapat dalam Renstra, baik Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 maupun Renstra Deputi Bidang Persidangan 2020-2024.		
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional			
Penjelasan	Jika melihat indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” bahwa terkait dengan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat korelasi antara indikator kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.		
5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan			

Penjelasan	Analisis Keberhasilan: <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang berjalan. - Mencari solusi jika ada kegiatan yang belum optimal. Alternatif Solusi: <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan kegiatan yang ada di Biro Kesekretariatan Pimpinan - Melakukan revisi terhadap anggaran yang belum optimal. 		
6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya			
	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja	99%	99.24%	100.24%
Anggaran	Rp19.446.329.430	Rp19.762.982.093	99.24%
Penjelasan	Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja “Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI” telah dilaksanakan secara efisien dan efektif, mengingat bahwa kinerja tidak berbanding lurus dengan penggunaan anggaran yang ada sehingga capaian kinerja tetap tercapai 100%		
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja			
Penjelasan	Pencapaian indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan” telah tercapai 100,24% Hal ini tercapai karena didukung dengan adanya program/kegiatan yang terdapat dalam Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam nomenklatur anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan melakukan upaya: <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang ada. - Mencari solusi jika ada kegiatan yang belum optimal.Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Biro Kesekretariatan Pimpinan. 		

Realisasi Anggaran

Berdasarkan pengukuran yang mengacu pada indikator-indikator kinerja sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka akuntabilitas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2023 dapat dilakukan analisis terhadap capaian kerjanya. Dukungan anggaran pada Biro Kesekretariatan Pimpinan telah mengalami revisi Program dan kegiatan untuk mengakomodasi kegiatan yang dilakukan, baik Pimpinan DPR RI maupun Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan demikian, kinerja yang disajikan adalah perbandingan antara realisasi dengan rencana/target kegiatan yang telah direvisi.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagai sistem pendukung kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI maka

penggunaan anggaran tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa perubahan alokasi anggaran pada tahun 2023 dimaksudkan untuk mengadaptasi kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam tahun 2023.

Hal terpenting terkait dengan realisasi anggaran adalah rencana anggaran pada tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan gerak terhadap rencana kerja Pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ketersediaan dukungan anggaran merupakan hal yang harus mutlak ada untuk terlaksananya kegiatan Pimpinan. Pengalokasian anggaran di Biro Kesekretariatan Pimpinan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tabel 32. Perubahan Alokasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023 dan realisasinya

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Pagu Awal) Rp.	ANGGARAN (revisi akhir) Rp.	Realisasi Rp.	%
SATKER SETJEN					
1.	Dukungan Manajemen	12.855.807.000	19.914.357.000	19.762.982.093	99,24%

Tabel 33. Capaian Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen (Satker Setjen)

No.	ANGGARAN TAHUN 2020			ANGGARAN TAHUN 2021			ANGGARAN TAHUN 2022			ANGGARAN TAHUN 2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
FASILITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN												
1.	Fasilitas Layanan TU Biro Kesekretariatan Pimpinan											
	1.272.916.000	1.232.222.900	96,80	2.350.368.000	2.312.198.000	98,38	5.194.754.000	4.983.123.300	95,93	5.455.202.000	5.384.187.525	98,70
2.	Fasilitas Layanan Ketua DPR RI											
	-	-	-	7.640.000	6.400.000	83,77	-	-	-	31.240.000	31.125.000	99,63
3.	Fasilitas Layanan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan											
	-	-	-	6.180.000	6.090.000	98,54	28.980.000	28.980.000	100	55.530.000	53.375.000	96,12
4.	Fasilitas Layanan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan											
	8.280.000	3.450.000	41,67	5.830.000	5.600.000	96,05	12.600.000	12.600.000	100	85.725.000	85.470.000	99,70
5.	Fasilitas Layanan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan											
	-	-	-	3.550.000	2.940.000	82,82	12.600.000	12.600.000	100	48.550.000	48.440.000	99,77
6.	Fasilitas Layanan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat											
	-	-	-	6.350.000	6.330.000	99,69	9.100.000	9.100.000	100	9.800.000	9.800.000	100
7.	Fasilitas Layanan Badan Musyawarah											
	100.260.000	93.562.000	93,32	353.665.000	341.876.000	96,67	330.030.000	329.086.500	99,71	392.424.000	392.130.000	99,93
8.	Fasilitas Layanan Musyawarah Pimpinan											
	53.462.000	35.964.087	67,27	123.685.000	116.715.000	94,36	190.830.000	185.163.450	97,03	302.930.000	302.814.700	99,96
9.	Fasilitas Layanan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal											
	1.331.560.000	1.236.146.400	92,83	4.271.438.000	4.094.628.394	95,86	4.882.321.000	4.661.202.105	95,47	12.223.556.000	12.149.556.952	99,39
10.	Fasilitas Layanan Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi											
	-	-	-	1.044.264.000	1.005.218.200	96,26	841.520.000	838.805.096	99,68	1.309.400.000	1.306.082.916	99,75

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) merupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ekonomis berarti memperhatikan kepatutan penggunaan input, sedangkan prinsip efisien membandingkan *input* atas *output*, dan prinsip efektif, yaitu membandingkan *outcome* atas *output*.

Ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya revisi terhadap DIPA. Revisi DIPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun.

Oleh sebab itu dengan perencanaan anggaran yang matang akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai program/kegiatan Pimpinan Dewan, dan semakin meningkatkan akurasi perencanaan anggaran yang berdampak semakin baik kualitas serapan anggaran yang proporsional. Selain itu, pelaksanaan perencanaan anggaran juga atas arahan dan kebijakan Pimpinan DPR RI.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Biro Kesekretariatan Pimpinan telah melaksanakan Perjanjian Kinerja Satker Setjen. Adapun capaian kinerja dari Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 34. Capaian Kinerja Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%
	2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI.	100%	100%	100%
	3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI.	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI.	3,33	3,69	110,81%
	5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.	99%	99,24%	100,24%

Dengan demikian, berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan dapat dilaksanakan dengan sangat baik, yaitu mencapai 102,21%. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh tersebut masih perlu terus ditingkatkan guna merespons tuntutan dukungan kepada DPR RI yang semakin dinamis. Capaian kinerja dari Biro Kesekretariatan Pimpinan dilaksanakan dengan sangat optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas, baik Pimpinan DPR RI maupun Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan tetap

memperhatikan kebijakan dan arahan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Capaian kinerja tersebut terlihat, baik dari aspek kuantitas (jumlah) maupun aspek kualitas (mutu). Artinya, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa seluruh kegiatan berkorelasi langsung dengan tingkat penyerapan anggaran tahun 2023.

Adapun beberapa langkah mendatang yang akan terus dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan untuk meningkatkan kinerjanya, antara lain:

1. Berkomitmen mengoptimalkan dukungan kesekretariatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI secara profesional dan modern;
2. Berkomitmen mengoptimalkan dukungan persidangan Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan sesuai dengan standar yang berlaku;
3. Berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi secara tertib dan akuntabel;
4. Berkomitmen mengupayakan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan dukungan, baik kepada Pimpinan DPR RI maupun kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
5. Berkomitmen untuk mengkaji dan melakukan revaluasi kembali Perjanjian Kinerja Biropim yang telah ditetapkan bersama unit kerja terkait sehingga diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Langkah-langkah optimalisasi yang berkesinambungan itu sangatlah penting karena tugas dan fungsi yang dilaksanakan Biro Kesekretariatan Pimpinan beserta jajarannya cukup berat. Terlebih lagi diperlukan gerakan cepat dan tepat dalam melayani Pimpinan sekaligus memberikan informasi serta dukungan lain secara akurat, penuh ketelitian serta kehati-hatian.

LAMPIRAN



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairil Patria, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Juli 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Suprihartini, S.IP., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001


Chairil Patria, S.IP., M.Si.
NIP. 19711105 199803 1 002


Disaksikan : Jodi
Tanggal : 15/08/2023
Jm

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase Dukungan Persidangan Pimpinan DPR RI	100%
		2. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR RI	100%
		3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Setjen DPR RI	100%
		4. Indeks Kepuasan Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI terhadap Pimpinan DPR RI, Pimpinan Fraksi, dan Anggota DPR RI serta Pimpinan Setjen DPR RI	3,33
		5. Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	99%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp12.855.807.000,00

Deputi Bidang Persidangan,


Suprihartini, S.IP., M.Si.
 NIP. 19710106 199003 2 001

Jakarta, 3 Juli 2023
 Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan,


Chairil Patria, S.IP., M.Si.
 NIP. 19711105 199803 1 002



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

No. 598/SP/11/2023

- Menimbang
- Bahwa untuk menyusun Buku Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023 perlu membentuk Tim Penyusun Buku Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023 ;
 - Bahwa pembentukan Tim Penyusun Buku Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Mengingat
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2021

MEMBERI PERINTAH

Kepada

No	Nama	NIP
1	Andi Iswanto, S.IP, M.I.P	198202042005021001
2	Wasono, SH	196805191992031005
3	Puji Lestari, SE	197806261998032002
4	Asep Supriadi, SAP, MAP	198106282005021001
5	Prima Cahya Chandrasari, S.E	197108061997032001
6	Agung Sulistiono, S.H., M.H	197910222005021002
7	Bayu Setiadi, S.IP	197903262005021002
8	Aan Andrianih, SH, MH	197709012002122002
9	Rifan Rachman Safari Andalas, S.Sos., M.H.	198301232009121001
10	Siti Chaerani Dewanti, S.Ars, M.Si	198704292018012001

Untuk

- Menyusun Buku Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2023;
- Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab

Jakarta, 8 November 2023

Karo Kesekretariatan Pimpinan,

Charil Patria, S.IP, M.Si
NIP. 197111051998031002



